

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Dora Kusumastuti. "Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan." *Yustisia Jurnal Hukum* 93, no. 3 (2015): 541–57. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3682>.
- Ii, B A B. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DOSEN (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99. <http://jurnal.unmer.ac.id/jbm/article/download/70/11> [http://repository.unpas.ac.id/5617/6/BAB III nita - revisi.pdf](http://repository.unpas.ac.id/5617/6/BAB%20III%20nita%20revisi.pdf) <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/5617> <http://repository.ut.ac.id/4408/2/SKOM4101-M1.pdf>.
- Juliani, Henny. "Perubahan Perilaku Aparatur Sebagai Model Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 113–25. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.113-125>. "Jurnal-Ilmu-Administrasi-Volume-7_No.3_2010.Pdf," n.d.
- Keman, Soedjajadi. "Soedjajadi Keman, Kesehatan Perumahan." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Universitas Airlangga* 2 (2005): 29–43.
- Kementerian PUPR RI. "Laporan Kinerja Kementrian Pupr 2018," 2019.

[https://www.pu.go.id/source/File pdf/LAKIP 2018/LAKIP PUPR TA 2018-compressed.pdf](https://www.pu.go.id/source/File%20pdf/LAKIP%202018/LAKIP%20PUPR%20TA%202018-compressed.pdf).

Mangeswuri, Dewi Restu. “KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) (Policy on Housing Loan through Housing Loan Liquidity Facility (FLPP)).” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2016): 83–95.

Masyarakat, Perumahan, and Berpenghasilan Rendah. “Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah, Penyediaan Tanah, Perumahan Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) . 1,” 2011, 1–29.

Muadi, Sholih, Ismail MH, and Ahmad Sofwani. “Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik.” *Jurnal Review Politik* 6, no. 2 (2016): 195–224.
<http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/90>.

Muntoha, Muntoha. “Demokrasi Dan Negara Hukum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 379–95.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>.

Mustamu, Julista. “Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Sasi* 17, no. 2 (2011): 1–9.

Parmadi, A.A. Ngr Agung Gd. “Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.” *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 1 (2018): 34–45.

Pembangunan, Teori, Drajat Tri Kartono, and M Si. “Konsep Dan Teori

- Pembangunan,” n.d., 1–62.
- Raharjo, Nanang Pujo. “Dinamika Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus : Penghuni Rumah Tipe Kecil Griya Pagutan Indah , Mataram).” *Universitas Diponegoro*, 2010.
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.” *Jurnal Publik*, 2017, 1–12.
<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>.
- Saputra, Rendi. “Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Sembering, Firdanta. “Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan BPK Dan BPKP Menghitung Kerugian Negara Dalam Rangka Tindak Pidana Korupsi,” no. 1 (2013): 1–98.
- Studi, Program, S Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. “Volume 6 , Nomor 4 , Tahun 2017 Website : [Https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN TAX AMNESTY DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU](https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/IMPLEMENTASI%20PEMBERLAKUAN%20TAX%20AMNESTY%20DI%20KANTOR%20PELAYANAN%20PAJAK%20PRATAMA%20SEMARANG%20TENGAH%20SATU) Hafizhah Mayang Sari , Nabitatus Sa ’ Adah , Henny Julani Volume 6 , Nomor ” 6 (2017): 1–10.
- Suhartoyo, Suhartoyo, Idqan Fahmi, and Irfan Syauqi Beik. “Perencanaan Dan Eksekusi Strategi Penyaluran Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

- Di Bapertarum-Pns.” *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 1 (2015): 46–55. <https://doi.org/10.17358/jabm.1.1.46>.
- Sukmana, Oman. “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State).” *Jurnal Sosial Politik* 2, no. 1 (2017): 103. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>.
- Yunus, Nur Rohim. “Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi.” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. 3, no. 2 (2015): 253–76.
- Efendi Jonaedi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2010).
- Muhadjirin Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996).
- Mustafa Bachsan, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, (Bandung: Alumni, 1982).
- Santoso Urip, Hukum Perumahan, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Sugiyono, Statistik untuk Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Peraturan Menteri PUPR No. 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah

Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Peraturan Menteri PUPR No. 20/PRT/M/2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Keputusan menteri PUPR No. 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan

C. Website

Situs Resmi Kementerian PUPR, <http://pembiayaan.pu.go.id/faq/faq/p/9-apa-yang-dimaksud-dengan-fasilitas-likuiditas-pembiayaan-perumahan-flpp>, diakses pada 31 Oktober 2020, Pukul 20.21.

Situs Resmi Kemntrian PUPR, <http://pembiayaan.pu.go.id/datamining/ckfinder/userfiles/files/Kebijakan%20dan%20Program%20Pembiayaan.pdf>, diakses pada 31 Oktober 2020, pukul 22.42.

Situs Resmi Kementrian PUPR <http://pembiayaan.pu.go.id/faq/faq/p/9-apa-yang-dimaksud-dengan-fasilitas-likuiditas-pembiayaan-perumahan-flpp> diakses pada 2 Oktober 2020, pukul 15.11

Situs Resmi Kementrian PUPR <http://pembiayaan.pu.go.id/faq/faq/p/82-hal-hal-apa-saja-yang-harus-diperhatikan-untuk-menciptakan-rumah-layak-huni>, diakses pada tanggal 29 November 2020, Pukul 14.31.

Situs Resmi Kementrian Keuangan <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/d5d98b36-3ed8-4b9f-9d95-fb95a6e8878cf> diakses pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 00.43.

Situs Resmi Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/subject/29/perumahan.html>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021, Pukul 14.55.

Situs Resmi Kementrian Keuangan, <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/d5d98b36-3ed8-4b9f-9d95-fb95a6e8878cf>

b95a6e8878cf diakses pada 31 Oktoberr 2020 pkl 22.00.

Situs Resmi Disperakim Jateng

<http://perumahan.disperakim.jatengprov.go.id/backlog.php>, pada 19 April 2021 Pukul 14.25 WIB.

Situs Online Pajak, <https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/take-home-pay>, pada 20 Maret 2021 Pukul 15.12 WIB.

Situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/8538/MENGENAL-BANK-TANAHLAND-BANKING-SEBAGAI-ALTERNATIF-MANAJEMEN-PERTANAHAN.html>, pada 25 Maret 2021 Pukul 14.30 WIB.

Situs Resmi Kementerian PUPR, <http://pembiayaan.pu.go.id/faq/p/16-apa-yang-dimaksud-dengan-ketepatan-sasaran-penerima-bantua7n-kpr-bersubsidi>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 12.03.

<https://www.antaranews.com/berita/1851988/wapres-rumah-mbr-harus-dipercepat-karena-backlog-masih-tinggi#mobile-nav>, diakses pada tanggal 23 Maret 2020, Pukul 11.21 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/15193061/wapres-kebutuhan-rumah-di-indonesia-capai-114-juta-unit>, diakses pada tanggal 1 April 2020, Pukul 22.19 WIB.

<https://newssetup.kontan.co.id/news/permintaan-rumah-subsidi-tahun-2021-bergantung-pada-kuota>, diakses pada tanggal 1 April 2020, Pukul 23.09 WIB.

